

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF CRIMINAL ACTS OF PERSONAL DATA ABUSE ON SOCIAL MEDIA

**By
Edo Kurniawan**

The development of technology, supported by the presence of the internet, has now changed the way humans communicate with each other. One form of technological and internet development that is currently widely used as a means of communication is social media. However, the use of social media has become unsafe due to cases of personal data misuse, which can cause various losses to the victims. The issue addressed in this research is how the form and provision of legal protection for victims of personal data abuse crimes on social media, and what factors hinder legal protection for victims of personal data abuse crimes on social media.

This research uses a normative juridical and empirical juridical approach. The normative approach is carried out by examining various literatures and regulations related to this research, while the empirical juridical approach is conducted by directly interviewing competent sources in the field of technology. Then an analysis was conducted using qualitative analysis.

The results of the research and discussion indicate that there is only one case of personal data abuse in the Polda Lampung region that is currently under investigation. Although there is only one case, legal protection for victims of personal data abuse on social media must still be carried out with preventive legal protection by providing education, socialization, and training to the public about personal data protection, creating regulations for the implementation of personal data protection, establishing personal data protection agencies, cooperating with national and international institutions, monitoring social media user activities, and overseeing companies related to personal data, all of which should be implemented by the state. The form of repressive legal protection is carried out by directly taking action against the perpetrators through arrest, investigation, and prosecution in accordance with legal provisions to impose sanctions on personal data abuse perpetrators and restore the victims' rights to receive compensation for the crime that occurred. The factors hindering legal protection for victims of personal data abuse crimes on social media include the absence of implementing regulations for the personal data protection law, the insufficient number of law enforcement officers, limited understanding of how to prove crimes, inadequate facilities and

Edo Kurniawan

tools, a society that is not yet fully aware of how to protect personal data, and the relatively new internet culture among some segments of the population. However, the main factor causing the obstacle is the absence of procedures and implementation regulations that clearly govern, resulting in the ineffectiveness of law enforcement carried out by law enforcement officers.

Recommendation in this study is that the government needs to create implementing regulations for the Personal Data Protection Law and establish a personal data protection agency. In addition, the government, through state agencies, is expected to carry out collaboration between state institutions to provide legal protection both preventively and repressively to victims of personal data misuse crimes by implementing various methods such as providing education and socialization to the public, monitoring companies or institutions managing personal data, and taking action against perpetrators of personal data misuse.

Keywords: Legal Protection, Personal Data Abuse, Social Media.

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DI MEDIA SOSIAL

**Oleh
Edo Kurniawan**

Perkembangan teknologi yang didukung dengan hadirnya internet saat ini telah mengubah cara manusia untuk melakukan komunikasi antar-manusia. Salah satu bentuk perkembangan teknologi dan internet yang saat ini banyak dipergunakan sebagai sarana berkomunikasi adalah media sosial. Namun, penggunaan media sosial saat ini menjadi tidak aman dikarenakan menimbulkan kasus penyalahgunaan data pribadi yang dapat menyebabkan berbagai kerugian yang dapat di derita oleh korbannya. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk dan pemberian perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan data pribadi di media sosial dan apa saja faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan data pribadi di media sosial.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan normatif dilaksanakan dengan mengkaji berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber yang berkompeten di bidang teknologi. Kemudian dilakukan analisis menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kasus penyalahgunaan data pribadi di wilayah Polda Lampung hanya terdapat satu kasus yang sedang dalam tahap penyelidikan. Meskipun hanya satu kasus perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan data pribadi di media sosial harus tetap dilakukan dengan perlindungan hukum secara preventif dengan memberikan edukasi, sosialisasi dan pelatihan ke masyarakat tentang perlindungan data pribadi, membuat peraturan pelaksana perlindungan data pribadi, membentuk lembaga perlindungan data pribadi, melakukan kerja sama antar-lembaga nasional maupun internasional, melakukan pemantauan aktivitas pengguna sosial media dan mengawasi perusahaan berkaitan dengan data pribadi seluruhnya dilaksanakan oleh negara. Adapun bentuk perlindungan hukum represif dilakukan dengan cara melakukan penindakan pelaku secara langsung dengan melakukan penangkapan,

Edo Kurniawan

pemeriksaan dan penuntutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk memberikan sanksi kepada pelaku penyalahgunaan data pribadi dan mengembalikan hak-hak korban untuk mendapatkan ganti rugi atas tindak pidana yang terjadi. Adapun faktor-faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan data pribadi di media sosial diantaranya belum adanya peraturan pelaksana undang-undang perlindungan data pribadi, jumlah aparat penegak hukum yang kurang dan terbatasnya pemahaman terhadap untuk membuktikan tindak pidana, fasilitas dan alat yang kurang mendukung, masyarakat yang belum paham sepenuhnya menjaga data pribadi dan budaya internet yang cenderung masih baru dikalangan beberapa masyarakat. Namun faktor utama yang menyebabkan hambatan adalah belum adanya prosedur dan peraturan pelaksana yang mengatur secara jelas, sehingga berakibat pada tidak efektifnya penegakan hukum yang dilakukan penegak hukum.

Saran dalam penelitian ini yaitu pemerintah perlu untuk melakukan pembuatan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan membentuk lembaga pelindungan data pribadi. Selain itu, pemerintah melalui lembaga negara diharapkan dapat melaksanakan kolaborasi antar lembaga negara untuk memberikan perlindungan hukum secara preventif dan represif kepada korban tindak pidana penyalahgunaan data pribadi dengan menerapkan berbagai cara seperti pemberian edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, pengawasan terhadap perusahaan atau lembaga pengelola data pribadi dan hingga menindak pelaku penyalahgunaan data pribadi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penyalahgunaan Data Pribadi, Media Sosial.